



TRITON

JURNAL MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

Volume 9, Nomor 2, Oktober 2013

**ANALISIS EKONOMI KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA
DI KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

**KONSENTRASI AMONIA, NITRIT DAN FOSFAT
PADA LINGKUNGAN BUDIDAYA IKAN
DI PERAIRAN POKA TELUK AMBON DALAM**

**STRUKTUR MORFOLOGI *Nerita albicila*
DI PERAIRAN TELUK AMBON DALAM**

**ANALISIS KELAYAKAN EKOWISATA PANTAI LAWENA,
NEGERI HUTUMURI KOTA AMBON**

**STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA BAGAN (*LIFT NET*)
DESA SATHEAN KECAMATAN KEI KECIL
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

**KOMUNITAS MAKRO ALGA
DI PERAIRAN PANTAI POKA DAN TAWIRI TELUK AMBON**

**AKTIVITAS PEMANFAATAN SUMBER DAYA MOLUSKA
DI PERAIRAN TELUK AMBON**

**PENGARUH PERBEDAAN VOLUME AIR TERHADAP TINGKAT
KONSUMSI OKSIGEN IKAN NILA (*Oreochromis sp.*)**

**KONDISI SUBSTRAT HUBUNGANNYA DENGAN
UKURAN CANGKANG *Lunella cinerea* DI PERAIRAN DESA TAWIRI**

**PENGUKURAN LUASAN KOMUNITAS LAMUN
DI PERAIRAN PESISIR GALALA**

**JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON**

TRITON

Vol. 9

No. 2

Hlm.75-136

Ambon, Oktober 2013

ISSN 1693-6493

ANALISIS EKONOMI KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA DI KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA

*(Institutional Economic Development Analysis of Rural Mina Business in
Aquaculture Fisheries at Sub District of Kei Kecil Southeast Maluku)*

Yoisy Lopolalan

*Jurusan Teknologi Hasil Perikanan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura
Jl.Mr.Chr.Soplanit, Poka-Ambon*

ABSTRAK: Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) diresmikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan masyarakat nelayan di Maluku Tenggara khususnya Kecamatan Kei Kecil, diharapkan program ini dapat memberdayakan masyarakat nelayan. Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Menganalisis konsep dan mekanisme pelaksanaan kelembagaan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB); 2) Mengidentifikasi bentuk dan strategi kelembagaan PUMP-PB; 3) Mengukur kinerja kelembagaan PUMP. Pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder. Responden diambil dengan menggunakan metode *exhausting samples*. Analisis data terdiri dari analisis konsep kerjasama, analisis pelaksanaan kerjasama, analisis bentuk dan karakteristik kerjasama, dan analisis kinerja kelembagaan kemitraan. Hasil penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu : 1) Pola koordinasi yang dikembangkan dalam program PUMP-PB bersifat integrasi vertikal; 2) Kelembagaan kelompok usaha bersama (KUB) yang dibentuk oleh tim teknis kurang sesuai dengan aspirasi pembudidaya rumput laut; 3) Tim teknis memiliki kewenangan yang lebih besar dari kelompok usaha bersama; 4) KUB belum sepenuhnya mendukung mekanisme penyaluran bantuan langsung; 5) Struktur organisasi program PUMP-PB secara konsep telah sesuai dengan kaidah organisasi, namun dalam implementasinya belum dapat berfungsi sesuai tugas dan peran; 6) Monitoring dan evaluasi terhadap semua tahapan kegiatan, belum dilaksanakan secara baik.

Kata Kunci: ekonomi kelembagaan, pengembangan, usaha mina pedesaan, perikanan budidaya

ABSTRACT: Development of Rural “Mina” Business (PUMP) initiated by Minister of Marine and Fishery through partner business with Southeast Maluku fishers, especially Sub District of Kei Kecil, expected to solve related to fishers empowerment. Research aimed was to: 1) analyzed concept and institutional implementation mechanism of PUMP; 2) identified form and institutional strategy of PUMP and; 3) estimated institutional performances of PUMP. Descriptive survey methods were used in the research. Data collected included primary and secondary data. Respondent were taken by using exhausting samples. Data analysis consists of co-operation concept analysis, co-operation implementation analysis, formed and characteristics of co-operation and co-operation institutional performance analysis. The results showed that there were several conclusions as follow: 1) coordination pattern develop on PUMP was vertical integrated; 2) institutional of business group (KUB) formed by technical team was unfit with seaweeds farmers desires; 3) technical team authority was higher than KUB; 4) KUB not entirely support direct aid distribution mechanism; 5) organization structure of PUMP was fit but on implementation was not

functionally to its job and role; 6) monitoring and evaluation of all activities was not well implemented.

Keywords: institutional economic, development, rural mina business, aquaculture fisheries

PENDAHULUAN

Beberapa kendala yang menjadi permasalahan pengembangan rumput laut di Provinsi Maluku pada umumnya dan Kabupaten Maluku Tenggara pada khususnya adalah pada tingkatan makro regional yaitu : (1) Pasar internal yang kecil (*small internal market*); (2) Skala ekonomi yang tidak mencukupi (*diseconomic of scale*); (3) Ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*); Kelembagaan di tingkat masyarakat dan pemerintah; (4) Kelembagaan di tingkat masyarakat dan pemerintah; (5) Halangan dalam perdagangan internasional (*entry barrier*) dan (6) Keterbatasan kemampuan daerah baik dari APBN maupun APBD. Sedangkan di tingkat mikro hambatan yang sering dikeluhkan oleh pembudidaya adalah : (1) Kesulitan memasarkan hasil; (2) Kesulitan untuk mengakses modal; (3) Kurangnya kemampuan manajemen usaha; (4) Tingginya biaya variabel sehingga produk yang dijual kurang berdaya saing; (5) Rendahnya harga jual; dan (6) Kesulitan memperoleh tenaga kerja yang berkualitas (Pemprov Maluku, 2010).

Sehubungan dengan tujuan pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat di wilayah pesisir yaitu Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan melalui suatu pola dari pelaksanaan program PNPM-MKP melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha perikanan budidaya sesuai dengan potensi desa dan masyarakatnya. Melalui program ini masyarakat pesisir dengan wadah kelompok mempunyai kebebasan untuk memilih,

merencanakan dan menetapkan kegiatan ekonomi yang dibutuhkan berdasarkan musyawarah kelompok.

Intervensi pemerintah dalam membantu nelayan dalam berbagai bantuan yang diberikan lewat program "kredit usaha kecil", dan bantuan dari berbagai instansi dalam bentuk modal kerja dan investasi bagi nelayan khususnya perikanan budidaya guna memberdayakan nelayan di Kabupaten Maluku Tenggara, belum sepenuhnya memberikan hasil yang memadai. Kerjasama yang berlangsung belum juga memberikan solusi yang jitu bagi peningkatan kesejahteraan nelayan termasuk pembudidaya di wilayah ini. Untuk mengatasi berbagai kondisi ini maka kehadiran PUMP yang diprakarsai oleh kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kerjasama dengan nelayan Maluku Tenggara khususnya Kecamatan Kei Kecil diharapkan menjadi solusi bagi upaya memberdayakan pembudidaya tersebut.

Tujuan umum penelitian ini adalah mengevaluasi dari sudut pandang ekonomi kelembagaan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) bagi pemberdayaan pembudidaya rumput laut. Secara khusus tujuan yang ingin diteliti meliputi:

1. Menganalisis konsep dan mekanisme pelaksanaan kelembagaan PUMP-PB dalam pemberdayaan pembudidaya.
2. Mengidentifikasi bentuk dan strategi kelembagaan PUMP-PB dalam pemberdayaan pembudidaya.
3. Mengukur kinerja kelembagaan PUMP dalam pemberdayaan pembudidaya.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta upaya mencari kebenaran ilmiah yang berkaitan dengan penguatan kapasitas kelembagaan dalam pemberdayaan pembudidaya.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Maluku Tenggara dan instansi terkait dalam merumuskan konsep dan strategi penguatan kapasitas kelembagaan yang mampu mendorong upaya pemberdayaan nelayan khususnya pembudidaya.
3. Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperluas wawasan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut tentang Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP-PB).

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli – September 2012 di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dengan mempertimbangkan bahwa kecamatan ini berada di gugusan pulau kecil di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan yang mendapatkan Program PUMP.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode survei. Data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung berdasarkan daftar pertanyaan dengan kelompok masyarakat budidaya rumput laut dan TIM teknis, dan data sekunder diperoleh melalui publikasi instansi-instansi terkait dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan substansi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dokumentasi dan triangulasi.

C. Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *survey descriptive* (deskriptif survei). Desain penelitian untuk menjawab ketiga tujuan dari penelitian ini didekati dengan deskriptif survei, yakni mendapat gambaran tentang suatu fenomena, fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara sistematis, faktual dan cermat. Pengambilan sampel dalam

penelitian ini menggunakan metode *exhausting sample*, yakni keseluruhan populasi sampel menjadi anggota sampel. Berdasarkan KUB yang memperoleh dana hibah program PUMP-PB berjumlah 4 kelompok dengan jumlah populasi sebanyak 40 pembudidaya. Sehingga responden diambil yakni seluruh anggota populasi berjumlah 40 responden. Sedangkan responden untuk TIM teknis berjumlah 4 responden.

D. Metode Analisis Data

1. Analisis Konsep Kerjasama

Analisis ini ditujukan untuk menelaah tentang aturan main dan sistem organisasi dari kelembagaan kerjasama program PUMP-PB. Metode analisis dilakukan secara deskriptif dengan penekanan pada aspek, batas *juridiksi*, *property right*, dan aturan representasi.

2. Analisis Pelaksanaan Kerjasama

Proses analisis dilaksanakan secara diskriptif terhadap tahapan-tahapan kegiatan yang terdiri atas proses sosialisasi, operasional kegiatan, kegiatan pembinaan dan monitoring dan evaluasi. Setiap tahapan tersebut dianalisis berdasarkan kerangka kesesuaiannya dengan aturan main yang berlaku dan organisasi pelaksanaannya.

3. Analisis Bentuk dan Karakteristik Kerjasama

Pada tahapan ini proses analisis ditujukan untuk mengetahui bentuk organisasi ekonomi kerjasama dengan mengacu pada spektrum kontinum (Gambar 1) dari kemungkinan bentuk-bentuk organisasi ekonomi mulai dari sistem pasar hingga organisasi berhirarki secara terintegrasi vertikal.

4. Analisis Kinerja Kelembagaan Kemitraan.

Kinerja kemitraan yang dianalisis meliputi: pendapatan nelayan, biaya transaksi, indikator keberhasilan, partisipasi dan persepsi partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Kerjasama Kelembagaan PUMP-PB

Secara umum konsep kerjasama antara masyarakat pembudidaya dan berbagai pihak

| | | Pilihan-pilihan strategi kearah koordinasi vertikal | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|
| | | Spot/Cash Market | Sistem kontrak | Strategi aliansi | Kooperasi formal | Integrasi vertikal | | |
| Karakteristik koordinasi dari invisible hand | Kepentingan Sendiri | | | | | | | Karakteristik koordinasi yang dikelola |
| | Hubungan jangka pendek | | | | | | | |
| | Ketebatasan & perilaku oportunistik | | | | | | | |
| | Keterbatasan distribusi informasi | | | | | | | |
| | Lebih Fleksibel | | | | | | | |
| | Independen | | | | | | | |
| | | External via harga dan pembakuan kualitas | External via spesifikasi dan ikatan legal | Saling kontrol satu sama lain | Internal via struktur terdesentralisasi | Internal via struktur tersentralisasi | | |
| Sistem pengendalian | | | | | | | | |

Keterangan: Garis diagonal mencerminkan pencampuran (mixed) dari peranan harga sebagai “invisible hand” dalam spot market dan karakteristik organisasi yang dikelola secara koordinasi yang terdapat dalam kelima alternatif strategis ke arah koordinasi integrasi vertikal. Area di atas diagonal menunjukkan tentang taraf relatif dari karakteristik “invisible hand” dan area di bawah diagonal menunjukkan taraf relatif dari karakteristik integrasi vertikal yang dikelola

Gambar 1. Spektrum kontinum dari kemungkinan bentuk-bentuk organisasi ekonomi mulai dari sistem pasar sampai kepada organisasi berhirarki secara terintegrasi vertikal

yang terlibat di dalamnya yakni Dinas Kelautan dan Perikanan, dan tenaga pendamping didasarkan pada konsep tertulis. Dalam implementasinya, konsep kerjasama yang mendasarinya dapat ditinjau dari dua aspek utama, yaitu:

1. Aturan Main

Kelembagaan kelompok pembudidaya rumput laut (KUB) dalam bahasan ini didekati dengan analisis deskriptif yang menitikberatkan pada aspek batas yuridiksi, hak kepemilikan dan aturan representatif yakni:

- a. Aspek batas yuridiksi, komponen dalam program PUMP-PB terkait dalam kerangka saling membutuhkan dan saling menunjang guna mendapatkan keuntungan. Pihak lain yang ikut terlibat pada prinsipnya untuk membina guna memperkuat peran dan posisi masing-masing. Kalaupun ada pihak tertentu yang turut memperoleh manfaat berkat keterlibatannya tersebut, tidak boleh berada di luar konsep pembinaan. Meskipun demikian, dalam aspek yuridiksi ini tidak nampak spesifikasi bantuan atau pembinaan dari setiap unsur terkait. Keterlibatan sebagai pembina lebih bersifat normatif

karena adanya kewajiban yang melekat pada instansi tersebut, tanpa disertai dengan perencanaan dan aktivitas yang sistematis dan terpadu. Kondisi ini menimbulkan sikap saling berharap dan terjadinya tumpang tindih kegiatan pembinaan atau pemberian bantuan.

- b. Aspek *property right*, terkait dengan format hak dan kewajiban Kelompok pembudidaya. Dalam proses budidaya yang dilakukan oleh Kelompok pembudidaya, maka wilayah untuk dijadikan sebagai lokasi budidaya tersebar tidak secara merata untuk semua pokdakan yaitu disekitar Perairan Kecamatan Kei Kecil. Kondisi budidaya dilakukan pada sore hari. Hasil budidaya berupa rumput laut yang telah dikeringkan langsung dijual ke pedagang pengumpul di desa maupun pada pedagang pengumpul di kota langgur maupun Kota Tual.

Mencermati kondisi Dinas Perikanan sebagai TIM Teknis yang tidak menyediakan pasar bagi KUB, terpaksa pembudidaya menjual hasilnya pada beberapa pedagang dengan harga yang tidak terkontrol. Jika rumput laut kering

yang dipasarkan dalam bentuk yang kurang baik (bercampur dengan pasir), maka dihargai dengan harga yang rendah oleh pedagang pengumpul. Kondisi ini menyebabkan kerugian pada KUB, hal ini disebabkan mereka tidak memiliki alternatif pasar yang lebih baik.

Mengenai pemberian bantuan berupa pembuatan wadah budidaya (*longline*), peralatan budidaya (tali, pelampung, mesin ketinting, body sampan, terpal, waring, pisau, sarung tangan) dan bibit melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan mekanisme swakelola yakni kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/SKPD/Instansi sebagai penanggung jawab anggaran, Instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat, telah dilakukan tetapi apa yang menjadi kebutuhan nelayan dalam pengadaan bantuan belum sepenuhnya terakomodir dengan baik. Sesuatu yang dipandang baik oleh pemerintah (dinas kelautan dan perikanan) belum tentu baik bagi Kelompok Pembudidaya. Indikasinya terlihat dari pengadaan bantuan yang diberikan masih kurang, sehingga pokdan harus menambah dana bagi kebutuhan usaha budidaya agar proses budidaya dapat dilakukan. Hasil penelitian ditemukan pula bahwa ada long line yang diberikan kepada KUB belum sesuai dengan kebutuhan KUB dalam melakukan usaha budidaya.

- c. Pengkajian terhadap aturan representatif dari program PUMP-PB maka yang nampak adalah hanya terbatas pada masing-masing partisipan. Tidak ada wadah khusus yang menjadi forum komunikasi atau pengambilan keputusan secara bersama. Pada situasi seperti ini, maka pokdakan akan dirugikan, selain itu kalangan pembina tidak dapat menyalurkan aspirasinya dengan baik dalam membela hak-hak kelompok masyarakat pembudidaya. Selanjutnya, kinerja kerjasama tidak dapat terevaluasi dan berkembang berdasarkan nilai-nilai kebersamaan. Situasi ini semakin memperburuk keadaan pokdakan, sebab

yang terlibat dalam proses kerjasama lebih banyak diperankan oleh ketua kelompok. Padahal seyogyanya forum komunikasi akan sangat membantu dalam membicarakan secara bersama mengenai masalah-masalah yang dihadapi serta upaya penanganannya.

Upaya penanganan konflik yang terjadi, ternyata diperparah oleh kerapuhan manajemen ditingkat KUB, menjadikan pembudidaya tidak dapat berbuat banyak dalam mengatasinya. Pengaduan-pengaduan yang diajukan kurang mendapat tanggapan baik dari pihak pokdan maupun dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, karena mekanisme kerjanya kurang jelas, maka walaupun pokdakan ingin membantu pembudidaya, namun tetap mengalami kesulitan. Sebagai contoh, pada saat kondisi perahu sampan yang tidak sesuai baik ukuran maupun jenisnya, maka meraka mengajukan permohonan untuk ada upaya pengganti, tapi kenyataannya sampai saat ini walaupun telah ada upaya untuk memberikan penjelasan terkait hal tersebut, oleh pihak tim teknis dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan kabupaten Maluku Tenggara, tetapi pengadaan untuk mengantikannya belum dilakukan.

2. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana PUMP-PB terdiri dari Tim Pengendali, Pokja-PB, Tim Pembina, Tim Teknis, Tenaga Pendamping dan Pokdakan penerima dana BLM. Ada empat komponen utama yakni pada tingkat pusat terdiri atas *pertama*: Tim Pengendali yang berfungsi untuk meningkatkan koordinasi antar unit kerja lingkup KKP dan antar instansi. Tim Pengendali terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ketua Tim Pengendali membentuk sekretariat dan Pokja-Pokja antara lain Pokja Perikanan Budidaya. Tugas Tim Pengendali adalah merumuskan kebijakan umum, menyusun pedoman pelaksanaan PNPM-Mandiri KP, melakukan sosialisasi pengembangan PNPM-Mandiri KP, mengkoordinir Provinsi terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri-KP lingkup KKP dan melakukan pengawasan dan pengendalian.

Mencermati kondisi yang terjadi di lapangan terhadap struktur organisasi program PUMP-PB, sebenarnya secara konsep telah sesuai dengan kaidah organisasi. Namun dalam implementasinya belum dapat berfungsi sesuai tugas dan peran dari masing-masing bagian yang terlibat dalam struktur tersebut. Hal ini berakibat pada tidak efisiennya keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program PUMP tersebut, bahkan status dalam organisasi tersebut hanya bersifat simbolistis. Berdasarkan hasil wawancara terhadap UPP misalnya, didapatkan bahwa mereka tidak pernah terlibat dalam pendampingan terhadap kelompok pembudidaya, walaupun secara struktur organisasi mereka berperan sebagai pendamping. Demikian halnya dengan instansi terkait, belum sepenuhnya bertanggungjawab dan rasa memiliki serta mengambil bagian dalam proses koordinasi terhadap kelancaran kerjasama melalui program PUMP-PB tersebut.

Selain itu, dari struktur yang dianalisis belum sepenuhnya memberikan kesempatan atau akses kepada kelompok pembudidaya untuk melakukan relasi langsung dengan instansi atau lembaga dalam proses penguatan kelembagaan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa semua kegiatan dari KUB hanya diperankan oleh ketua kelompok. Anggota KUB hanya mengandalkan faktor kepercayaan kepada ketua kelompok, padahal mekanisme seperti ini tidak sepenuhnya bisa diandalkan dalam memperkuat *bargaining position* dalam memberdayakan usahanya.

B. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan PUMP-PB

Dalam pelaksanaan program kerjasama PUMP-PB di Kabupaten Maluku Tenggara khususnya di Kecamatan Kei Kecil yang akan disoroti adalah pelaksanaan kegiatan pada semua tahapan program. Tahapan-tahapan yang akan ditelaah adalah: sosialisasi program, operasional kegiatan, kegiatan pembinaan serta monitoring dan evaluasi. Penjelasan dari masing-masing tahapan kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Program PUMP-PB

Hasil penelitian proses sosialisasi program PUMP-PB di Kabupaten Maluku Tenggara

khususnya Kecamatan Kei Kecil untuk Tahun 2012 di dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan, sebagai TIM teknis di bantu oleh tenaga pendamping yang diangkat oleh Kementriak Kelautan dan Perikanan. Hal ini sangat dipahami karena program PUMP-PB masih merupakan hal yang baru dan masih perlu dipahami lebih jauh oleh dinas berdasarkan kondisi wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dinas, mereka mengakui bahwa awal pembentukan PUMP-PB di Kabupaten Maluku Tenggara masih terdapat banyak kekurangannya. Sementara materi sosialisasi telah dilakukan berdasarkan pedoman teknis (Pednis) PUMP-PB Tahun 2011 dan sesuai rencana. Waktu sosialisasi yang direncanakan untuk Tahun 2011 selama kurang lebih 2 bulan yakni pada bulan Februari dan Maret. Dari hasil wawancara kepada Pokdakan, ternyata proses sosialisasi yang dilakukan masih terasa kurang, terutama bagi yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, mereka belum sepenuhnya memahami kerjasama yang dibangun melalui program tersebut.

2. Operasionalisasi Kegiatan

Pelaksanaan kemitraan usaha melalui program PUMP-PB yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara berlangsung sejak Tahun 2001 yaitu :

- a. Mendorong upaya peningkatan produksi, nilai tambah komoditas dan tumbuhnya wirausaha baru dibidang perikanan budidaya.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan secara berkelanjutan melalui pengembangan wirausaha dibidang perikanan budidaya.
- c. Meningkatkan fungsi kelembagaan kelompok pembudidaya ikan yang kuat serta membangun jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam akses permodalan usaha perikanan budidaya.

Program PUMP-PB diupayakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara khususnya Kecamatan Kei Kecil melalui pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan. Operasional kegiatan PUMP-PB,

yang terbangun sejak tahun 2011 di fasilitasi oleh dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, dan berdasarkan Pendis PUMP-PB, dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku mempunyai tugas sebagai berikut : 1) Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), 2) Melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, 3) Melaksanakan kegiatan identifikasi, seleksi, verifikasi, rekapitulasi data calon kelompok penerima BLM PUMP-PB dituangkan dalam Berita Acara, 4) Melakukan verifikasi RUB dan dokumen administrasi lainnya guna pencairan BLM. 5) Menyampaikan KAK, RUK, RUB dan dokumen administrasi kepada Tim Pembina melalui surat Kepala Dinas Kabupaten/Kota. 6) Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan 7) Melakukan pemantauan pemanfaatan BLM PUMP-PB oleh Pokdakan untuk usaha budidaya ikan.

Penyaluran BLM PUMP-PB berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu melalui prosedur swakelola kepada kelompok masyarakat (Pokdakan), yang pelaksanaannya direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok itu sendiri dengan bimbingan dan pembinaan dari Tenaga Pendamping dan dipantau oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

3. Kegiatan Pembinaan

Berdasarkan kenyataan, hasil penelitian tentang kurangnya pembinaan yang terjadi terhadap kelompok pembudidaya, menyebabkan saling tidak percaya antara anggota kelompok dan ketua kelompok, bahkan terhadap TIM teknis (tenaga Pendamping dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Maluku Tenggara). Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu dibuat rencana kerja kelompok dengan jelas, pertemuan-pertemuan kelompok dan hak serta kewajiban setiap anggota kelompok. Sesuai pendapat Anwar (1997) mengatakan untuk mengatasi sifat pembonceng (*free rider*) baik dalam sumberdaya alam maupun kelompok, maka harus dibuat pembagian hak dan kewajiban yang jelas antara setiap anggota kelompok. Beberapa alternatif yang dapat ditempuh untuk membenahi kelompok antara lain merealisasi dan mengembangkan tugas dan

peran kelompok sekaligus memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) kelembagaan kelompok tersebut untuk masa yang akan datang, diantaranya: 1). Pemilihan ketua kelompok dilakukan oleh semua anggota kelompok dan ditetapkan dengan surat keputusan oleh mitra. 2). Memberikan kewajiban/tanggungjawab yang jelas kepada ketua kelompok agar dapat dilakukan evaluasi. 3). Menggali potensi sosial yang berkembang pada masing-masing peserta dan mengembangkannya di dalam kelompok. 4. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap semua tahapan kegiatan, belum dilaksanakan secara baik. Hal ini berdampak terhadap keberlanjutan program tersebut. Tidak berjalannya proses monitoring dan evaluasi sebagaimana yang diharapkan dalam pedoman teknis PUMP-PB juga mengakibatkan berbagai masalah yang dihadapi oleh Kelompok pembudidaya itu sendiri tidak dapat tertangani dengan baik. Sebagai contoh, pembagian bantuan dalam bentuk sarana prasarana budidaya yang tidak seragam seperti jumlah tali bentangan yang tidak seragam, ukuran dan jenis sampan yang tidak sesuai, akhirnya mendapat *complain* dari kelompok pembudidaya Ubur Vuan desa Ohio badar, dan belum mendapat tanggapan secara serius, hal ini mengakibatkan beberapa pembudidaya tidak menggunakan fasilitas bantuan tersebut.

C. Bentuk dan Strategi Kerjasama Kelembagaan PUMP-PB

Pola Koordinasi yang diterapkan dalam program PUMP-PB sebagai berikut:

1. Integrasi vertikal

Pola koordinasi kelembagaan *integrasi vertikal* memiliki kebaikan dan kelemahan. Kebaikannya adalah kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan akan lebih mudah dan efektif sebagai akibat terpusatnya dan seragamnya jenis informasi yang diterima. Kelemahan dari pola ini yakni pada kondisi organisasi yang melibatkan banyak orang dan jenjang panjang akan mengakibatkan keputusan yang diambil terlambat dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Jalur informasi yang dilalui panjang sehingga sebagian

informasi telah hilang (*missing information*). Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Brinkenhorf *et al.* (1990) bahwa faktor yang menentukan keberhasilan suatu institusi yang pertama adalah aliran informasi antara “*stakeholders*” institusi. Keburukan yang juga terjadi dalam penggunaan pola koordinasi *integrasi vertikal* adalah pada kegiatan/aktivitas yang mengejar keuntungan (*profit taking*) akan menyebabkan terjadinya penghisapan oleh mitra terhadap kelompok pembudidaya. Dengan menerapkan koordinasi integrasi vertikal pihak mitra dapat mengatur segala keinginannya dan sebaliknya pihak kelompok pembudidaya mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap mitra. Akibat dari kondisi tersebut, pihak kelompok pembudidaya akan mengikuti sepenuhnya semua keputusan mitra baik dalam pengaturan bantuan sarana produksi, maupun harga input dan output yang diterima oleh kelompok pembudidaya. Sehingga dikaitkan dengan karakteristik pokdakan yang berorientasi bisnis (mencari keuntungan) dan karakteristik usaha budidaya yang memiliki resiko usaha yang tinggi akibat faktor musim dan resiko pesaing, maka pola koordinasi integrasi vertikal yang diterapkan kurang tepat dan akan merugikan kelompok pembudidaya.

2. Koordinasi kooperatif formal

Hubungan kerjasama atau koordinasi yang bersifat *koperatif formal* terlihat pada hubungan kerjasama antara mitra dengan kelembagaan/instansi pemerintah seperti, bank dan instansi terkait lainnya. Pola hubungan kerjasama dilakukan hanya dengan Tenaga Pendamping yang berfungsi untuk melakukan pelatihan teknis budidaya, penumbuhan kelompok, Pengelolaan Keuangan kelompok dan pembinaan manajemen usaha. Dari hasil penelitian ternyata pola koordinasi ini tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berdampak kepada kesulitannya nelayan dalam memasarkan rumput laut kering mereka terutama pada saat panen.

3. Koordinasi aliansi strategis

Koordinasi yang dilakukan oleh kedua mitra dengan kelembagaan kelompok pembudidaya juga termasuk dalam *aliansi strategis*. Hal ini ditunjukkan melalui

ketergantungan bersama terhadap kelangsungan dari proyek PUMP-PB tersebut. Pihak mitra mempunyai tugas mencapai tujuan proyek, sedangkan Kelompok pembudidaya mempunyai kepentingan terhadap keberhasilan proyek agar pendapatannya meningkat yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan kelompok pembudidaya tersebut. Dari uraian tersebut di atas terlihat adanya kebutuhan bersama terhadap aktivitas ekonomi yang dilakukan dan bila salah satu keluar dari aliansi tersebut, maka akan ada yang dirugikan. Hal inilah yang merupakan salah satu ciri pokok dari koordinasi yang bersifat aliansi strategis.

4. Koordinasi sistem kontrak

Berdasarkan uraian tentang pola koordinasi yang diterapkan dalam Program PUMP-PB antara KUB dan Dinas Kabupaten Maluku Tenggara maka sebenarnya pola koordinasi yang mesti diterapkan berdasarkan kesepakatan melalui kontrak perjanjian adalah kelembagaan koordinasi *aliansi strategis*. Namun kenyataan di lapangan ternyata pola ini tidak dapat diterapkan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan terputusnya koordinasi antara KUB dengan pihak dinas kelautan dan perikanan sebagai Tim Teknis yang sebenarnya memiliki peran yang besar dalam hal pembinaan terhadap pokdakan.

Pola koordinasi kelembagaan lebih cenderung pada pola *integrasi vertikal*. Hal ini terlihat dengan adanya keputusan yang diambil harus melewati jenjang sesuai dengan garis koordinasi dari KUB, tenaga pendamping desa, yang bertugas di dalam mengkoordinasi kegiatan proyek kemitraan tersebut, tidak dapat mengambil keputusan yang mendesak ketika menemui hambatan di lapangan terhadap berbagai masalah seperti terjadinya ketidakseragaman sarana prasarana bantuan budidaya yang diberikan bagi kelompok pembudidaya dalam melakukan usaha budidaya rumput laut. Tenaga pendamping harus mendapat persetujuan dari jenjang yang di atasnya, olehnya memerlukan waktu dan proses yang panjang sehingga akan berdampak pada peningkatan produktivitas dari kelompok pembudidaya.

D. Kinerja Kelembagaan PUMP-PB

Analisis tentang pendapatan pembudidaya, biaya transaksi, indikator keberhasilan, serta partisipasi dan persepsi peserta kerjasama PUMP-PB dilakukan untuk mengetahui kinerja kelembagaan kerjasama. Hasil analisis diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Kelompok Pembudidaya

Periode budidaya rumput laut yang dilakukan oleh kelompok pembudidaya di Desa Letman, Desa Sathean, Desa Letvuan, dan Desa Ohoibadar dari bulan Januari hingga Agustus 2012 menghasilkan total produksi sebesar 6,800 kg atau 6,8 ton. Rata-rata produksi tertinggi terdapat pada kelompok pembudidaya rumput laut di Desa Letman sebesar 250 kg, sedangkan terendah terdapat pada kelompok pembudidaya rumput laut di Desa Ohoibadar sebesar 50 kg. Tiap pembudidaya di Desa Letman dapat memproduksi rumput laut sebanyak 58 - 99 kg tiap periode produksinya dan tertinggi pada periode produksi bulan Maret. Sedangkan tiap pembudidaya di Desa Ohoibadar hanya mampu memproduksi rumput laut sebanyak 44 – 58 kg tiap periode produksi dan periode produksi terbaik hanya pada bulan Agustus.

Untuk memproduksi rumput laut tersebut rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh pembudidaya berkisar antara Rp 100.000,- hingga Rp 200.000,- tiap periode produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut adalah untuk biaya pengingat bibit rumput laut, biaya perawatan dan pengawasan selama usaha budidaya, dan biaya pemanenan rumput laut. Total biaya yang dikeluarkan selama setahun adalah sebesar Rp 18.000.000,-, sesuai dengan aktivitas berproduksi maka biaya produksi tertinggi terdapat di Desa Letman dan terendah di Desa Ohoibadar.

Dengan harga jual rumput laut relatif stabil pada harga Rp 10.000/kg dari bulan Januari hingga Agustus 2012 diperoleh nilai produksi atau penerimaan usaha budidaya rumput laut sebesar Rp 68.000.000,-. Penerimaan tertinggi terdapat di Desa Letman dan terendah di Desa Ohoibadar. Rata-rata penerimaan usaha budidaya rumput laut pada periode produksi pertama (bulan Januari - Maret) adalah sebesar Rp 432.000,- hingga 987.000,- pada tiap nelayan/pembudidaya,

periode produksi kedua (bulan Juni – Agustus) adalah sebesar Rp 580.000,- hingga 931.000,- tiap nelayan/pembudidaya, dan periode produksi ketiga (bulan Agustus) adalah sebesar Rp 442.000 hingga Rp 582.000,- tiap nelayan/pembudidaya.

Berdasarkan penerimaan tersebut maka pendapatan total yang diperoleh usaha budidaya rumput laut di empat desa tersebut adalah Rp 50.000.000,-/tahun. Atau selama satu tahun produksi tiap kelompok nelayan/pembudidaya dapat memperoleh rata-rata pendapatan sebesar Rp 330.000,- hingga Rp 1.950.000,- per tahun. Tiap kelompok budidaya di Desa Letman memperoleh pendapatan sebanyak Rp 432.000,- hingga Rp 787.000,- tiap periode produksi, sedangkan kelompok budidaya di Desa Sathean adalah Rp 228.000,- hingga Rp 500.000,-, kelompok budidaya di Desa Letvuan adalah Rp 482.000,- hingga Rp 612.000,-, kemudian kelompok budidaya di desa Ohoibadar adalah Rp 292.000,- hingga Rp 380.000,-. Terlihat bahwa pendapatan kelompok usaha budidaya di Desa Letman memiliki pendapatan tertinggi dibandingkan dengan desa lainnya.

2. Biaya Transaksi

Hasil penelitian terhadap biaya transaksi pada progra melalui program PUMP-PB memperlihatkan bahwa biaya transaksi oleh TIM Teknis berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan tahun berjalannya proyek tersebut, terdiri atas biaya identifikasi potensi, monitoring dan evaluasi, biaya sosialisasi, serta biaya pembentukan KUB. Besarnya biaya transaksi tersebut sebesar Rp. 10.000.000 per KUB. Sementara biaya transaksi yang dikeluarkan oleh KUB selama berlangsungnya kerjasama sebesar Rp.3.500.000,-.

Besarnya biaya transaksi yang dikeluarkan ini tentu lebih mengutamakan efisiensi investasi pada kegiatan yang dilakukannya. Karena dinas kelautan dan perikanan dalam hal ini TIM teknis bukan merupakan perusahaan swasta, sehingga keuntungan ekonomi bukan merupakan faktor yang diprioritaskan pada tujuan akhir dari kegiatan tersebut, melainkan keuntungan sosial yang diutamakan. Hal ini berbeda dengan kegiatan yang dibangun oleh perusahaan swasta dimana lebih menitikberatkan pada keuntungan

ekonomi akhir dari kegiatan yang dilakukannya. Terdapat perbedaan antara pelaksana proyek yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta, hal ini dapat menyebabkan keterikatan dan koordinasi yang berbeda sehingga dapat membedakan biaya koordinasi/administrasi. Bila pelaksanaannya pemerintah, mungkin efisiensi investasi bukan merupakan tujuan utama yang diinginkan, melainkan lebih mengarah pada keuntungan sosial yang akan dihasilkan. Sebaliknya bila swasta sebagai pelaksana proyek lebih mengutamakan efisiensi investasi dengan tujuan akhir adalah keuntungan (*private profit*) yang tinggi, maka pihak swasta tentu akan berupaya untuk memperkecil biaya administrasi dengan memperpendek urusan administrasi atau memperkecil biaya sosial melalui “penghisapan” terhadap pembudidaya.

3. Indikator Keberhasilan

Harapan atau aspirasi keberhasilan kerjasama di kalangan partisipan meskipun dalam beberapa hal memiliki kesamaan, tetapi terdapat pula beberapa perbedaan (Tabel 1). Jika diasumsikan kedudukan setiap kriteria sama pentingnya bagi setiap kelompok partisipan maka pencapaian target Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara dalam kerjasama dengan pembudidaya hanya sekitar

23,53%. Rendahnya pencapaian target ini disebabkan pembudidaya belum mampu mengembangkan usaha secara baik.

Penelaahan terhadap kriteria keberhasilan dapat dikatakan bahwa buruknya pendapatan kelompok pembudidaya, disebabkan tidak berfungsinya pola kerjasama sebagaimana diharapkan dalam aturan main. Indikasi terhadap hal itu tercermin pada tidak berjalanya kegiatan pembinaan terutama dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara. Pembudidaya tidak dipersiapkan secara matang untuk mengelola usaha mereka berdasarkan prinsip-prinsip manajemen rasional. Selain itu intervensi dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini TIM teknis terlalu kuat, sehingga potensi pembudidaya tidak teraktualisasi dengan baik. Kondisi tersebut secara akumulatif telah mempersulit terealisasinya harapan pembudidaya partisipan terhadap kerjasama program PUMP-PB tersebut.

4. Persepsi dan Partisipasi Peserta Kemitraan

Berdasarkan hasil wawancara dengan 40 pembudidaya ditemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara para pembudidaya peserta kemitraan.

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Pelaksanaan Kerjasama Program PUMP-PB

| No. | Kelompok Partisipan | Indikator Keberhasilan | Nilai |
|-----|--|--|-------|
| 1 | Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara | - Kelompok masyarakat pembudidaya dapat memanfaatkan dan memelihara bantuan secara baik dan bertanggung jawab. | 4 |
| | | - Melalui kerjasama program PUMP-PB pembudidaya mampu dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup rumahtangga | 2 |
| 2 | Kelompok Usaha Bersama (KUB) | - Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara melalui TIM teknis dapat memberikan pembinaan teknis maupun manajemen secara intensif dan sistematis | 3 |
| | | - TIM teknis mampu bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyediakan pasar bagi pembudidaya | 2 |
| 3. | Instansi terkait (Bank, TIM Teknis) | - Bantuan dalam Bentuk Hibah tidak hanya diberikan untuk kebutuhan tapi penyediaan sarana pasca panen bagi pengembangan usaha budidaya mesti menjadi perhatian | 2 |
| | | - Bantuan bagi KUB, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang pada gilirannya dapat membantu pemenuhan kehidupan rumah tangga kelompok pembudidaya | 4 |

Sumber : Data primer diolah (2012)

Ket : 5 = sangat baik, 4 = baik, 3 = kurang baik 2 = buruk 1 =sangat buruk

Sebanyak 29 peserta memiliki persepsi baik, sedangkan 11 peserta lainnya memiliki persepsi kurang baik dan buruk (tidak mendukung) mekanisme program pemberian bantuan dana hibah yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara. Perbedaan persepsi ini disebabkan perbedaan latar belakang dari pembudidaya, situasi dan kondisi pembudidaya. Bila dikaji dari latar belakang, situasi dan kondisi pembudidaya di lokasi penelitian ternyata pengalaman dan tingkat pendidikan akan turut mempengaruhi peserta dalam menanggapi proyek kerjasama tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta mendukung terhadap program dan prosedur kegiatan pembentukan kelompok, pembinaan dan pelatihan serta penyaluran bantuan. Peserta yang berpartisipasi terhadap kegiatan tersebut sebesar 85% menunjukkan bahwa keinginan dan kesadaran yang besar untuk mengembangkan usaha budidaya, sehingga lewat kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perubahan tingkat pendapatan mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini juga ditunjang oleh tingkat pemahaman dari pembudidaya tersebut, karena pendidikan dan pengetahuan yang dimilikinya. Sementara yang tidak mendukung terhadap program dan prosedur pembentukan kelompok, pembinaan dan pelatihan serta penyaluran bantuan, disebabkan tingkat pemahaman yang masih rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola koordinasi yang dikembangkan dalam program PUMP-PB adalah bersifat integrasi vertikal.
2. Kelembagaan kelompok usaha bersama (KUB) yang dibentuk oleh tim teknis kurang sesuai dengan aspirasi pembudidaya rumput laut.
3. Berdasarkan uraian tugas, dari segi kewenangan tim teknis memiliki

kewenangan yang lebih besar dari kelompok usaha bersama.

4. Dari segi kepemilikan pembudidaya memiliki hak terhadap segala paket bantuan yang diberikan, sedangkan dari segi aturan representasi hampir semua pengambilan keputusan dilakukan oleh tim teknis, sementara pembudidaya (KUB) hanya menerima segala keputusan yang telah dibuat.
5. KUB program PUMP-PB belum sepenuhnya mendukung mekanisme penyaluran bantuan langsung.
6. Struktur organisasi program PUMP-PB secara konsep telah sesuai dengan kaidah organisasi. Namun dalam implementasinya belum dapat berfungsi sesuai tugas dan peran dari masing-masing bagian yang terlibat dalam struktur tersebut.
7. Kurangnya pembinaan yang terjadi terhadap kelompok pembudidaya, menyebabkan saling tidak percaya antara anggota kelompok dan ketua kelompok, bahkan terhadap TIM teknis
8. Monitoring dan evaluasi terhadap semua tahapan kegiatan, belum dilaksanakan secara baik sehingga berdampak terhadap keberlanjutan program.

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian adalah:

1. Fungsi pengawasan, keterlibatan semua pihak pada semua tahapan, pelatihan manajemen usaha, teknis budidaya, pembinaan serta penyediaan pasar perlu dilakukan oleh TIM teknis kepada KUB.
2. Keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah desa hingga kecamatan, pemerintah terkait diperlukan agar menjamin keberlanjutan program dan usaha pembudidaya.
3. Pembinaan terhadap KUB oleh tim pendamping harus dilakukan secara teratur dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2009. *Budidaya Rumput Laut (Tali Letak Dasar)*. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM. Bank Indonesia, Jakarta

DJPB. 2010. *Tumbuhkan Wirausaha Tingkatkan Produksi Budidaya*. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta

Nikijuluw, V.P.H. 2010. *Minapolitan: A Cluster Approach for Seaweed Industry*. Makalah disampaikan pada Kegiatan SEABFEX III tanggal 14 – 17 Juli 2010 di Surabaya.

Pemprov Maluku. 2010. *Rencana Pengembangan Klaster Rumput Laut di Provinsi Maluku*. Pemerintah Provinsi Maluku, Ambon.

Schmid AA. 1987. *Property, Power and Public Choice. An Inquiry Into Law and Economics*. Second Edition. Praeger Publisher. New York. 76 p

TROBOS, 2010. *Sesumbar Jadi yang Terbesar*. Majalah TROBOS edisi Pebruari 2010.